

KONTRIBUSI ORGANISASI SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(STUDI KASUS ORGANISASI SOSIAL DI KOTA PALEMBANG-SUMATERA SELATAN)

Oleh: Abu Hanifah dan Nunung Unayah***

ABSTRACT

This research on the Contribution of Social Organizations in the Development of Social Welfare is a case study conducted in the city of Palembang by taking 30 Social Organizations as targets of research. Social Organizations in the city of Palembang in general is still in the category of grow and evolve, and already incorporated. All Social Organizations have an organizational structure and job descriptions of each Social Organizations manager. Social Organizations managers in general had attended high schools and have attended Social Organization management training. Social Organization infrastructure is considered well enough thanks to the facilities provided by the government. Thanks to help from the government, businesses, and donors from the public, Social Organizations can provide services to the social welfare problem (POM) that exist in their environment. Contributions of Social Organizations can support government policy to prevent and cope with the increasing number of POM. Government's commitment to the accelerated Social Organizations contributions program still need to be improved, for which local governments provide funding for Social Organizations through deconcentration and regional budgets is still considered very small. Facilities granted by local government is not yet organized well enough, local government just give Social Organization assistance without the know how to market the product of service recipient. Other than that the mentoring, monitoring, evaluation, and coordination with relevant agencies considered still lacking. In order to increase the performance of Social Organizations in the development of social welfare, it is recommended to implemented the following matters: (1) improved coordination among relevant agencies, (2) the need for mentoring, monitoring, and evaluation carried out in a planned and sustainable manner by the government officials, (3) empowerment programs should be based upon the needs of service recipients, in a sense it should be "bottom-up" and not "top-down", and (4) empowerment of Social Organizations regarding the capacity and competence as a partner with the government needs to be done in a planned and sustainable manner.

Keywords: Contribution, Social Organization, and Social Welfare Development

ABSTRAK

Penelitian mengenai Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini bersifat studi kasus yang dilaksanakan di kota Palembang dengan mengambil 30 Orsos sebagai sasaran penelitian. Orsos di kota Palembang pada umumnya masih dalam

* Abu Hanifah: Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial RI.

** Nunung Unayah: Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial RI

kategori tumbuh dan berkembang dan semuanya sudah berbadan hukum. Semua Orsos memiliki struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing pengelola Orsos. SDM pengelola Orsos pada umumnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan telah mengikuti pelatihan manajemen Orsos. Sarana dan prasarana Orsos dinilai cukup baik berkat adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Berkat adanya bantuan dari pemerintah, dunia usaha, dan donator dari masyarakat, Orsos dapat memberikan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada dilingkungannya. Kontribusi Orsos dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi meningkatnya jumlah PMKS. Komitmen pemerintah terhadap program akselerasi kontribusi Orsos masih perlu ditingkatkan, hal mana pemerintah daerah memberi bantuan dana untuk Orsos melalui dana dekonsentrasi dan APBD dinilai masih sangat minim. Fasilitas yang diberikan pemerintah belum terskema, dalam arti pemerintah baru memberi bantuan, tapi belum sampai bagaimana memasarkan hasil/produk dari penerima pelayanan. Disamping itu pendampingan, monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan instansi terkait dipandang masih kurang. Agar kinerja Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial semakin meningkat, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: (1) perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi terkait; (2) perlu adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dari aparat pemerintah; (3) program pemberdayaan harus didasarkan atas kebutuhan penerima pelayanan, dalam arti bersifat “bottom-up” dan bukan “top-down”; dan (4) pemberdayaan Orsos menyangkut kapasitas dan kompetensi sebagai mitra kerja pemerintah perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Kata-kata kunci: *Kontribusi, Organisasi Sosial, dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan sosial selama ini yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial populasinya masih cukup besar. Kondisi ini tercermin dari 2.250.152 anak terlantar, 109.454 anak jalanan, 198.578 anak nakal, 1.644.002 lanjut usia terlantar; 1.544.184 penyandang cacat; 80.260 orang penyalahgunaan napza dengan jumlah ODHA sebanyak 11.483 orang; ketunaan sosial sebanyak 123.887 yang terdiri dari tuna susila sebanyak 63.661 orang; pengemis sebesar 35.057 orang; dan gelandangan 25.169 orang (Pusdatin Kesos, 2008).

Upaya penanganan permasalahan sosial, pada dasarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal mana tercermin dalam salah satu klausul Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut pada Bab VII mengenai peran masyarakat terdiri dari pasal 38 s/d pasal 45. Pasal 38 ayat (1) berbunyi : masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran sebagaimana yang dikemukakan pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan oleh : perorangan; keluarga; organisasi keagamaan; organisasi sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; badan usaha; lembaga kesejahteraan sosial; dan lembaga kesejahteraan sosial asing.

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, pemerintah cq Kementerian Sosial telah

memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan program untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembentukan wadah-wadah partisipasi masyarakat beserta sarana penunjang kegiatannya. Realisasi kebijakan ini telah terbentuk partisipan, baik secara individu maupun secara kelompok/kelembagaan yang mempunyai konsentrasi kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat yang selanjutnya disebut dengan istilah pilar-pilar partisipan. Manifestasi dari pilar-pilar partisipan yang maksud adalah: Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); Karang Taruna; Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat; Taruna Siaga Bencana (TAGANA); dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).

Salah satu diantara pilar-pilar partisipan yang telah dikemukakan di atas, organisasi sosial (Orsos) telah berkembang cukup pesat dan keberadaannya merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada dilingkungannya.. Persoalannya apakah pesatnya pertumbuhan Orsos tersebut mampu mengimbangi lajunya permasalahan sosial?. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, maka diadakan penelitian ini dengan judul “*Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: “*Bagaimana Kontribusi Organisasi Sosial Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial?*”. Berhubung kontribusi Orsos tidak terlepas dari kondisi dan program akselerasi pelayanan kesejahteraan sosial, maka rumusan masalah di atas dapat dijabarkan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi Orsos yang telah difasilitasi oleh Kementerian Sosial?

2. Bagaimana kontribusi Orsos sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial?
3. Bagaimana program yang dapat memberikan akselerasi kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Mencermati rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Teridentifikasi kondisi Orsos yang telah difasilitasi oleh Kementerian Sosial;
- b. Teridentifikasi kontribusi Orsos sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Teridentifikasi program yang dapat memberikan akselerasi kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi input dalam penyusunan program bagi unit terkait di lingkungan Kementerian Sosial dan unit terkait lainnya di daerah (propinsi, kota) dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan: wawancara; observasi; studi dokumentasi; dan focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan terhadap penerima pelayanan dan pengurus Orsos serta instansi terkait, antara lain: Dinas Sosial TK I Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial TK II Kota Palembang; BK3S Propinsi Sumatera Selatan; dan K3S Kota Palembang. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi penerima pelayanan dan potensi lingkungan sekitar Kota

Palembang . Studi dokumentasi berupa data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku atau laporan tentang wilayah penelitian, seperti : Kota Palembang Dalam Angka (dari BPS); laporan BK3S; dan sejarah Kota Palembang. Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan tokoh masyarakat baik formal maupun informal (ketua Karang Taruna, PKK, PSM, pejabat terkait) di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan , dengan mengambil sampel secara purposif sebanyak 30 Orsos dari 113 Orsos yang ada di Kota Palembang. Sampel sebanyak 30 Orsos diambil secara proporsional untuk mewakili Orsos tumbuh, berkembang , dan maju.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi yuridis formal, kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Dalam pasal 34 (setelah perubahan ke empat) terdapat empat ayat yang berbunyi sebagai berikut : (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial , pada pasal I ayat (1) Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya; (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan

yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut pada pasal 3 dikemukakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan : (a) meningkatkan taraf kesejahteraan , kualitas, dan kelangsungan hidup; (b) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (e) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (f) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2006 : 4). Lebih lanjut dikemukakan bahwa ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, pasangan yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami

masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

Sulistiati dalam makalahnya yang berjudul “Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial” yang dimuat dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Seri IT : 01, mengemukakan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : (1) Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kembuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; (2) Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara; (3) Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya; dan (4) Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Keempat fungsi pembangunan kesejahteraan sosial dimaksud mencakup upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam tata penghidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu wadah peranserta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Orsos. Secara konseptual *social organization* adalah derivatif dari konsep *Social Structure* yang diformulasikan oleh antropolog Inggris Radcliffe – Brown. *Social Structure* adalah aspek statis dari susunan hubungan sosial dalam sebuah masyarakat, maka *social organization* adalah aspek dinamisnya. Jika *social structure* terdiri atas

status, maka *social organization* adalah terdiri atas rule. Jika dalam *social structure* orang berbicara tentang pola perilaku yang ideal dan normatif, maka dalam *social organization*, orang berbicara tentang pola perilaku empiris dan situasional (Marzali, 2005 : 27). Pandangan Talcot Parson tentang hubungan antara organisasi sosial dan struktur sosial secara esensial sama dengan konsep Radcliffe – Brown, tetapi sebagai tambahan Parson memasukkan sistem sosial yang terdiri dari struktur sosial dan organisasi sosial. Parson membedakan empat tindakan dari sistem sosial, yaitu : nilai-nilai sosial; pola-pola institusional; kolektivitas (kelompok) yang terspesialisasi, dan peranan-peranan yang dijalankan oleh individu-individu dalam kolektivitas atau kelompok itu (lihat Saifuddin, 2005: 170 - 172).

Dalam kehidupan bermasyarakat ada empat jenis ikatan yang muncul saling berkaitan, yaitu: (1) gagasan; (2) normatif; (3) tindakan; dan (4) perhatian. Jaringan hubungan gagasan (keyakinan, pendirian, dan pengertian) merupakan dimensi ideal dari kehidupan bersama, yakni “kesadaran sosialnya”. Jaringan hubungan aturan (norma, nilai, ketentuan, dan cita-cita) merupakan dimensi normatif dari kehidupan bersama, yakni “institusi sosialnya”. Dimensi edial dan normatif mempengaruhi apa yang secara tradisional dikenal dengan kebudayaan. Jaringan hubungan tindakan merupakan dimensi interaksi dalam kehidupan bersama, yakni “organisasi sosial”. Jaringan hubungan perhatian (peluang hidup, kesempatan, akses terhadap sumber daya) merupakan dimensi kesempatan kehidupan bersama, yakni “hirarki sosialnya”. Dimensi interaksi dan kesempatan memperkuat ikatan sosial dalam arti sebenarnya (lihat Sztompka, 2007: 9 - 11).

Mencermati beberapa konsep Orsos yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Orsos merupakan dimensi pola perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain bahwa setiap masyarakat memiliki Orsos sebagai wadah

peranserta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2003 : 29) dikemukakan mengenai definisi Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Definisi ini digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai kontribusi organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam buku pedoman klasifikasi organisasi sosial (Depsos, 2008 : 6) dikemukakan bahwa Orsos dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu berdasarkan wilayah kerja/jangkauan pelayanan dan tipologi. Berdasarkan wilayah kerja /jangkauan pelayanan , Orsos dapat dibagi menjadi enam tingkat wilayah, yaitu : (1) Orsos tingkat desa/kelurahan, yaitu jangkauan pelayanannya mencakup hanya satu desa/ kelurahan; (2) Orsos tingkat kecamatan, yaitu jangkauan pelayanannya lebih dari satu desa/ kelurahan; (3) Orsos tingkat kabupaten, yakni jangkauan pelayanannya lebih dari satu kecamatan; (4) Orsos tingkat provinsi, jangkauan pelayanannya lebih dari satu kabupaten; (5) Orsos tingkat regional, dengan jangkauan pelayanan lebih dari satu provinsi, namun belum mencapai setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia; dan (6) Orsos tingkat nasional, dengan jangkauan pelayanannya mencapai setengah atau lebih jumlah provinsi di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan tipologi dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu : (1) Orsos tipe A atau “Mandiri”, yaitu telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan tidak tergantung pada bantuan pemerintah; (2) Orsos tipe B yang dikategorikan “Berkembang” , adalah yang telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan, dan memiliki potensi untuk dikembangkan; (3) Orsos tipe C yang dikategorikan “Tumbuh” , yaitu telah memenuhi

sebagian standar kelembagaan dan pelayanan, namun masih perlu pendampingan untuk pengembangannya; dan (4) Orsos tipe D yang dikategorikan “Embrio” , yaitu yang belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanannya masih memerlukan bantuan untuk memenuhi standar minimal.

Kontribusi Orsos dapat dipahami sebagai sumbangan atau dukungan yang diberikan oleh Orsos dalam menanggulangi berbagai permasalahan sosial. Dalam kaitannya dengan penelitian ini kontribusi dapat dipahami sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Wujud partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah pemikiran, kemampuan , tenaga, keahlian, material dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya dukungan atau sumbangan Orsos dapat mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial yang ada dilingkungannya.

III. HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah kota terbesar ke dua setelah Medan. Luas wilayah kota Palembang adalah 102,47 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak kota Palembang cukup strategis karena dilalui jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antara daerah di pulau Sumatera. Disamping itu dikota Palembang juga terdapat sungai Musi yang dilintasi jembatan Ampera yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Jumlah penduduk kota Palembang pada pertengahan tahun 2008 sebesar 1.417.047 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 697.681 jiwa dan perempuan 719.366 jiwa (BPS,2009). Dengan demikian rasio penduduk menurut jenis kelamin sebesar 96,99 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih kecil di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah maupun masyarakat, antara lain : keluarga miskin; anak terlantar; anak nakal; anak jalanan; lanjut usia terlantar; tuna sosial (gelandangan dan pengemis, pekerja sek komersial atau PSK/ WTS); korban penyalahgunaan napza; HIV/ AIDS; penderita cacat; penderita penyakit kronis; wanita rawan sosial ekonomi; bekas narapidana; dan masyarakat tinggal di daerah rawan bencana alam. Untuk menanggulangi permasalahan sosial tersebut pemerintah dan masyarakat telah bekerjasama memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang telah tersedia di kota Palembang.

Adapun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tersedia di kota Palembang antara lain potensi alam/pertanian, peternakan dan perikanan, serta tersedianya potensi dan sumber kesejahteraan sosial , seperti para donatur, fasilitas dalam bentuk panti sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dan berbagai jenis Orsos. Semua Orsos yang ada di kota Palembang telah berbadan hukum dan mempunyai struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing pengurus/pengelola.

Kondisi Orsos di kota Palembang pada umumnya masih dalam kategori tumbuh dan berkembang, hanya sebagian kecil termasuk Orsos maju dan belum mempunyai bidang usaha/jasa yang menghasilkan dana untuk mendukung kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun demikian , berkat adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta para donatur dan dunia usaha, ternyata kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial cukup berarti. Oleh karena itu keberlangsungan pelayanan organisasi sosial di kota Palembang untuk sementara ini masih sangat tergantung dari perhatian pemerintah, dunia usaha dan para donatur.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan Orsos dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) bermuara pada

pelayanan masyarakat atau keluarga kurang mampu, anak yatim-piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan remaja bermasalah social (sering melakukan pergaulan bebas). Terhadap keluarga-keluarga kurang mampu disediakan akses untuk berusaha dengan bantuan dana simpan pinjam. Dengan adanya bantuan dana tersebut, keluarga-keluarga kurang mampu dapat mendirikan usaha dagang kecil-kecilan dan dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Bagi anak yatim-piatu dan anak terlantar diberi perlindungan dan pengembangan potensi dengan bantuan dana pendidikan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan formal dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Bagi lanjut usia terlantar diberi pelayanan dalam bentuk perlindungan yang ditampung dalam panti dan kebutuhan dasar mereka diperhatikan dan dipenuhi oleh Orsos. Sedangkan bagi para remaja yang sering melakukan pergaulan bebas diberi bimbingan moral-spirituan oleh ustad untuk menyadari mereka bahwa pergaulan bebas menyimpang dari norma-norma agama.

Hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan gambaran umum atau diskripsi kota Palembang dalam kaitannya dengan peranserta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B. DESKRIPSI DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi yang akan dikemukakan di bawah ini merupakan hasil dari: (1) penyebaran angket terhadap 30 pengurus Orsos yang menjadi sasaran penelitian; (2) wawancara mendalam terhadap 3 orang pengurus yang terpilih; (3) wawancara terhadap penerima pelayanan; dan (4) diskusi kelompok terhadap praktisi dan tokoh masyarakat.

Adapun data dan informasi yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, wawancara dan diskusi kelompok, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Hasil angket

- a. Legalitas dari 30 Orsos yang menjadi sasaran penelitian semuanya telah berbadan hukum, mempunyai akte notaries, terdaftar pada Kesbanglinmas, Dinas Sosial Kota dan Provinsi serta adanya legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Semua Orsos mempunyai struktur organisasi dan uraian tugas pengelola.
- c. Pengurus/ketua Orsos pada umumnya tamatan Sekolah Menengah Atas dan telah mengikuti pelatihan manajemen Orsos.
- d. Jumlah tenaga (SDM) masing-masing Orsos bervariasi, yaitu : Orsos dalam kategori “tumbuh”, jumlah tenaganya antara 5 s/d 10 orang; Orsos dalam kategori “berkembang”, jumlah tenaganya berkisar antara 11 s/d 25 orang; dan Orsos dalam kategori “maju/mandiri”, jumlah tenaganya berkisar antara 26 s/d 45 orang.
- e. Secara fisik (ruang kantor, ruang umum, ruang pelayanan, peralatan kantor, peralatan pelayanan, dan alat transportasi) dari 30 Orsos yang menjadi sasaran penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Orsos kategori “tumbuh” dinilai masih sangat kurang terutama mengenai ruang pelayanan, peralatan kantor, dan peralatan pelayanan; (2) Orsos kategori “berkembang” dinilai relative cukup; dan (3) Orsos kategori “maju/mandiri” dinilai memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai.
- f. Cara menjangkau peserta layanan pada umumnya dilakukan secara alamiah (melalui jaringan social, dari mulut kemulut).
- g. Pelayanan yang diberikan oleh Orsos , antara lain pengembangan potensi (pendidikan dan pelatihan keterampilan), perlindungan, menyediakan akses untuk berusaha, bantuan dana pendidikan, bantuan dana kesehatan, bimbingan mental spiritual.

- h. Secara umum pendanaan Orsos masih tergantung dari pihak luar, dalam pengertian pada umumnya Orsos belum memiliki bidang usaha/jasa yang menghasilkan uang untuk memberi pelayanan kepada peserta layanan.
- i. Pada umumnya Orsos berhasil membantu peserta layanan sehingga sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosial.

2. Hasil wawancara mendalam

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap 3 (tiga) Orsos di Kota Palembang, yaitu: (1) Lembaga Wanita Peduli Sriwijaya; (2) Panti Werda: Yayasan Dharma Bakti Kasih; dan (3) Panti Asuhan Nur Asiyah. Hasil wawancara mendalam terhadap ke tiga Orsos tersebut adalah sebagai berikut.

a. Lembaga Wanita Peduli Sriwijaya

1) Organisasi Sosial

Hasil wawancara mengenai Orsos, Yaitu: (1) Menurut Ernita Meri, motivasi mendirikan Orsos karena adanya rasa kepedulian sosial; (2) gagasan awal (inisiatif) mendirikan Orsos dengan mengumpulkan teman-teman untuk mendirikan sebuah Yayasan: “Lembaga Wanita Peduli Sriwijaya”; (3) Fokus Orsos adalah pemberdayaan keluarga dengan sasaran para remaja yang sering melakukan pergaulan bebas; (4) Untuk memperoleh klien dilakukan penyuluhan sosial dari rumah ke rumah; dan (5) Wilayah pelayanan masih terbatas pada Kota Palembang.

2) Pembangunan Kesos

Hasil wawancara mengenai pembangunan kesos, yaitu: (1) Kondisi klien sebelum diberikan pelayanan adalah keluarga miskin dan anak remaja dari keluarga tersebut biasa melakukan pergaulan bebas; (2) Upaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dilakukan penyuluhan sosial, diberikan pendidikan kerahanian, dan simpan pinjam; (3) Setelah diberikan pelayanan menunjukkan adanya perubahan, hal mana keluarga miskin dapat

mendirikan usaha dagang kecil-kecilan yang dapat meringankan ekonomi keluarga. Disamping itu anak-anak remaja dapat disadarkan melalui pendidikan kerahaniaan oleh para tokoh agama; (4) Upaya untuk merubah kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya keluarga kurang mampu, yaitu : keluarga-keluarga miskin dapat dientaskan menjadi tidak miskin, dan para remaja yang sebelumnya sering melakukan pergaulan melanggar hukum, menjadi manusia yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah agama; (5) Upaya yang dilakukan untuk memotivasi dan mengembangkan potensi masyarakat dilakukan penyuluhan sosial, pengajian/pendidikan rohani, dan usaha simpan pinjam; (6) Untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan jaringan kerja dengan pihak pengusaha setempat; dan (7) Untuk meningkatkan pengetahuan klien diberikan pendidikan dan keterampilan , dan untuk meningkatkan derajat kesehatan diadakan kerja sama dengan RSUD

b. Panti Werda: Yayasan Dharma Bakti Kasih

1). Organisasi Sosial

Hasil wawancara mengenai Orsos,yaitu : (1) Motivasi mendirikan Orsos karena adanya rasa kepedulian sosial terhadap permasalahan yang ada dilingkungannya, terutama masalah lanjut usia; (2) Mengadakan pertemuan untuk mendirikan sebuah yayasan yang bernama “ Dharma Bakti Kasih “, dengan tujuan untuk mengatasi masalah lanjut usia terlantar; (3) Untuk mendapatkan klien disampaikan kepada saudara atau keluarga yang mempunyai orang tua yang dipandang perlu mendapat bantuan pengasuhan melalui Panti Werda; (4) Jangkauan pelayanan tidak terbatas wilayah tertentu, tapi cakupannya seluruh Indonesia; dan (5) Pelayanan yang diberikan kepada klien lanjut usia terlantar adalah permakanan, kesehatan, dan bimbingan mental spiritual.

2) Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Hasil wawancara mengenai pembangunan kesos, yaitu: (1) Kondisi klien sebelum diberikan pelayanan terlantar karena tidak mampu keluarga mengurusinya; (2) Kondisi setelah mendapat pelayanan , secara fisik mereka sehat dan non fisik hidup mereka tenang; (3) Bantuan yang diberikan berupa permakanan, bimbingan mental spiritual, dan untuk memotivasi dan mengembangkan potensi masyarakat dilakukan penyuluhan sosial; dan (4) Terhadap klien lanjut usia terlantar oleh panti ditanam disiplin, banfgun pagi secara teratur, diberi waktu untuk bermain, menonton YTV pada waktunya, diberi bimbingan mental spiritual, dan diberi makan yang bergizi untuk menjaga kesehatan mereka.

c. Panti Asuhan Nur Asiyah

1) Organisasi Sosial

Hasil wawancara mengenai Orsos, yaitu : (1) Motivasi mendirikan Orsos karena adanya rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial; (2) Fokus perhatian Orsos adalah anak terlantar dan anak yati m dari keluarga miskin; (3) Untuk memperoleh klien dilakukan secara natural dari mulut ke mulut; (4) Wilayah/jangkauan pelayanan hanya terbatas pada Provinsi Sumatera Selatan; dan (5) Pelayanan yang diberikan berupa bimbingan mental spiritual, pendidikan dan kesehatan.

2) Pembangunan kesejahteraan sosial.

Hasil wawancara mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu: (1) Kondisi klien sebelum diberi pelayanan adalah terlantar dan setelah diberi pelayanan tidak lagi terlantar; (2) Upaya yang dilakukan terhadap klien adalah diberikan bantuan langsung berupa permakanan; (3) Upaya advokasi diberi perlindungan kesehatan bekerja sama dengan pihak Puskesmas setempat; (4) Untuk meningkatkan taraf pendidikan klien diberikan bantuan pendidikan dengan cara menyekolahkan mereka sesuai

dengan tingkat pendidikannya masing-masing; dan (5) Mereka juga diberi keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

3. Hasil wawancara dari penerima pelayanan.

- a. Pada umumnya jenis Orsos adalah Panti Asuhan dengan sasaran pelayanan adalah anak terlantar dan anak yatim. Hanya beberapa Orsos non panti yang sasaran pelayanannya adalah keluaran kurang mampu, pemberdayaan perempuan, dan keluarga muda mandiri.
- b. Pelayanan yang diberikan adalah permakanan, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan bimbingan mental spiritual.
- c. Pelayanan kesehatan dengan cara memberi makanan yang mengandung cukup gizi untuk menjaga kesehatan, dan apabila sakit dibawa ke Puskesmas.
- d. Menurut responden pelayanan dari Orsos sangat membantu untuk meringankan beban orang tua, disamping itu pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pendidikan, keterampilan dan bimbingan mental spiritual.
- e. Bekal pendidikan dan keterampilan yang diberikan melalui Orsos dapat membantu mereka nantinya untuk merebut peluang kerja.

4. Hasil diskusi kelompok

- a. Masih kurangnya perhatian pemerintah, hal ini Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota Palembang terhadap Orsos terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas para pengurus.
- b. Fasilitasi pemerintah belum terskema, dalam pengertian pemerintah baru memberi bantuan (material, immaterial, dan pelatihan) belum sampai pada bagaimana memasarkan hasil /produk penerima layanan.

- c. Program (bantuan/pemberdayaan) seringkali tidak tepat sasaran, bersifat top down, tidak berdasarkan kebutuhan penerima layanan.
- d. Ada kesan tidak ada koordinasi dengan instansi terkait.

C. ANALISIS

Data dan informasi yang telah dikemukakan di atas mencerminkan kondisi, kontribusi dan akselerasi Orsos sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisis data akan dikemukakan mengenai : Kondisi Orsos; Kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial; dan Program akselerasi kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

1. Kondisi Organisasi sosial

a. Legitimasi Orsos

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus Orsos, maka dapat dikemukakan bahwa motivasi untuk mendirikan Orsos karena adanya rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial melihat banyaknya permasalahan sosial yang ada dilingkungannya. Untuk mewujudkan rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial dalam bentuk memberi pertolongan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka muncullah ide dasar atau inisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan atau organisasi. Bermula dari inisiatif tersebut mereka berkumpul untuk merencanakan pembentukan sebuah organisasi sosial. Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai nama organisasi, sasaran organisasi, tujuan organisasi, struktur organisasi, dan uraian tugas pengurus atau pengelola organisasi. Hasil peretemuan berupa suatu kesepakatan berdirinya sebuah organisasi sosial, maka langkah selanjutnya mereka mengadakan penyuluhan sosial untuk mendapat klien atau peserta pelayanan. Setelah diperolehnya peserta pelayanan, maka mereka mengurus izin domisili untuk melaksanakan kegiatan orsos yang baru didirikan.

Adapun jumlah Orsos di Kota Palembang sebanyak 113 Orsos dan 104 Orsos diantaranya telah berbadan hukum, dan 9 Orsos masih termasuk dalam kategori “embrio”. Pada umumnya Orsos di Kota Palembang masih dalam kategori “tumbuh” dan “berkembang”, hanya sekitar 20 persen yang termasuk dalam kategori Orsos “ maju atau mandiri “. Persyaratan yang harus dipenuhi Orsos untuk memperoleh legitimasi sebagai Orsos berbadan hukum, yaitu adanya : akte notaris; izin domisili; AD/ART; struktur organisasi; dan data warga binaan atau penerima pelayanan. Dengan adanya persyaratan tersebut , maka Orsos dapat diproses untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah. Proses legitimasi dilakukan secara berjenjang melalui Dinas Sosial kota/kabupaten, baru ke BK3S, kemudian ke Dinas Sosial Provinsi. Waktu yang dibutuhkan pada masing-masing instansi rata-rata 3 hari. Setelah mendapat legitimasi dari pemerintah, Orsos mempunyai kewajiban untuk melapor kegiatannya secara berkala setiap satu semester atau 6 (enam) bulan sekali secara berjenjang.

b. Kondisi SDM Orsos

Berdasarkan data dari hasil penyebaran angket terhadap 30 pengurus Orsos yang menjadi sasaran penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pengurus/ketua Orsos pada umumnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan telah mengikuti pelatihan manajemen Orsos. Hal ini tidak berbeda dengan informasi yang diberikan oleh pengurus BK3S dan pejabat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang menilai bahwa pengurus Orsos bersifat standar berkat adanya pelatihan-pelatihan manajemen terhadap pengurus Orsos. Namun ada sedikit perbedaan dengan pendapat pejabat Dinas Sosial Koya Palembang yang menyatakan sekitar 40 persen kondisi pengurus Orsos cukup baik dan 60 persen di pandang masih kurang.

Berkat pendidikan dan keterampilan mengenai manajemen Orsos yang dimiliki

pengurus Orsos cukup memadai, akan mempermudah Orsos menggali dan mengenali masalah kesejahteraan sosial yang ada dilingkungannya. Hal itu akan mempermudah Orsos merencanakan dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah. Pelayanan yang diberikan Orsos terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) , berkat adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu : pemerintah (pusat dan daerah); badan usaha; pengusaha; dan masyarakat sebagai mitra kerja Orsos. Pemerintah memberi fasilitas berupa sarana (peralatan pelayanan) dan prasarana (ruang pelayanan) serta dana permakanaan. Sedangkan badan usaha, pengusaha, dan masyarakat mendukung dana sebagai donatur.

Disisi lain apabila dilihat dari kuantitas tenaga yang ada di masing-masing Orsos, dimana Orsos dalam kategori “tumbuh” jumlah tenaga masih sangat terbatas (antara 5 s/d 10 orang) , Orsos dalam kategori “berkembang” anantara 11 s/d 25 orang dinilai cukup memadai, dan Orsos dalam kategori “maju/mandiri” jumlah tenaganya berkisar antara 26 s/d 45 orang dinilai sudah memadai. Disamping jumlah tenaga pada Orsos kategori “tumbuh” dan “berkembang “ dinilai belum memadai dan nampaknya selain dari pengurus Orsos belum banyak yang mewndapat pelatihan , hal ini dapat menimbulkan kendala dalam melaksanakan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan. Sehubungan dengan hal ini perlu diperhatikan hasil diskusi kelompok terhadap para praktisi dan tokoh masyarakat yang menyatakan masih kurangnya perhatian pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga Orsos. Untuk itu agar Orsos dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik dipandang perlu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga Orsos melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan program pelayanan kesejahteraan sosial.

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran angket terhadap 30 orang pengurus Orsos yang menjadi sasaran penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasarana (ruang kantor, ruang umum, ruang pelayanan, peralatan kantor, peralatan pelayanan, dan alat transportasi) dari masing Orsos sangat bervariasi. Bagi Orsos yang termasuk dalam kategori “tumbuh”, sarana dan prasarana yang dimiliki dinilai masih sangat terbatas terutama mengenai ruang pelayanan, peralatan kantor, peralatan pelayanan, dan alat transportasi. Untuk Orsos yang termasuk kategori “berkembang”, sarana dan prasarana yang dimiliki dinilai relative cukup baik, misalnya memiliki ruang pelatihan beserta peralatannya, ruang belajar, ruang bermain, dan perpustakaan. Disamping itu pada umumnya Orsos memiliki ruang kantor serta peralatannya (ruang pimpinan, ruang rapat, ruang pekerja sosial) dan memiliki alat transportasi berupa sepeda motor. Sedangkan bagi Orsos kategori “maju/mandiri”, sarana dan prasarana yang dimiliki lebih lengkap dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Orsos kategori “berkembang” dan alat transportasi yang dimiliki pada umumnya mobil.

2. Kontribusi Organisasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden penerima pelayanan yang pada umumnya anak terlantar, anak dari keluarga miskin dan anak yatim, dapat dikemukakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Orsos dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima pelayanan, seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar para penerima pelayanan, berarti secara tidak langsung dapat meringankan beban dan tanggung jawab keluarga-keluarga miskin yang anak-anak mereka mendapat pelayanan dari Orsos. Bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu diberi pelayanan melalui program pemberdayaan

keluarga dengan sistim simpan pinjam dapat mendirikan usaha dagang kecil-kecilan, dan dapat membantu ekonomi keluarga mereka. Bagi lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan melalui panti, ternyata dapat menikmati sisa hidup mereka dengan tenang dan kesehatan mereka terawat dengan baik.

Disamping wawancara terhadap penerima pelayanan, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) pengurus Orsos di Kota Palembang, yaitu : Pengurus Lembaga Wanita Peduli Sriwijaya; Pengurus Panti Werda: Yayasan Dharma Bakti Kasih; dan Pengurus Panti Asuhan Nur Asiyah. Hasil wawancara mendalam terhadap Pengurus Lembaga Wanita Peduli Sriwijaya, dapat dikemukakan bahwa kondisi penerima pelayanan sebelum diberikan pelayanan adalah **keluarga miskin dan anak-anak remaja dalam keluarga-keluarga tersebut** biasa melakukan pergaulan bebas. Untuk menanggulangi permasalahan sosial tersebut dilakukan penyuluhan sosial, diberikan pendidikan rohani, dan menyediakan akses untuk berusaha dengan bantuan uang simpan pinjam. Setelah diberikan pelayanan oleh Orsos ternyata menunjukkan adanya perubahan. Hal mana keluarga-keluarga miskin dengan adanya dana simpan pinjam dapat mendirikan usaha dagang kecil-kecilan dan ternyata usaha tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomui keluarga mereka. Bagi anak-anak yang sebelumnya sering melakukan pergaulan bebas dapat disadarkan melalui pendidikan kerohanian oleh para tokoh agama atau ustad.

Hasil wawancara mendalam terhadap Pengurus Panti Werda : Yayasan Dharma Bakti Kasih, dapat dikemukakan bahwa kondisi penerima pelayanan sebelum mendapatkan pelayanan adalah **lanjut usia terlantar** yang tidak mampu diurus oleh keluarga atau sanak familinya. Mereka medapat perlindungan melalui pelayanan dalam panti . Upaya yang dilakukan Orsos dalam bentuk langsung berupa bantuan permakanaan, dan bimbingan mental-spiritual. Disamping itu oleh pihak panti/Orsos

ditanam disiplin, bangun pagi secara teratur, diberi waktu untuk bermain, menonton TV pada waktunya, dan diberi makan bergizi untuk menjaga kondisi kesehatan mereka dan apabila ada yang sakit segera dibawa berobat ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat. Setelah mendapat pelayanan melalui panti, ternyata secara fisik kondisi mereka terlihat sehat dan secara non fisik hidup mereka tenang.

Hasil wawancara mendalam terhadap Pengurus Panti Asuhan Nur Asiyah, dapat dikemukakan bahwa kondisi penerima pelayanan sebelum diberikan pelayanan adalah **anak terlantar**. Mereka diberi bimbingan mental-spiritual dan pendidikan sebagai wujud pengembangan potensi. Bantuan pendidikan dilakukan dengan cara menyekolahkan mereka sesuai dengan tingkat pendidikan mereka masing-masing, dan mereka juga diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dalam peningkatan derajat kesehatan, pihak panti atau Orsos telah mengadakan kerja sama dengan Puskesmas terdekat dan apabila ada klien/penerima pelayanan yang sakit segera dirujuk ke Puskesmas untuk berobat. Setelah mereka mendapat pelayanan dari Orsos kondisi mereka tidak lagi terlantar.

Mencermati hasil wawancara terhadap penerima pelayanan dan pengurus Orsos sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Orsos terhadap penerima pelayanan cukup bermanfaat., dalam arti masalah kesejahteraan sosial yang disandang warga masyarakat sebelum menerima pelayanan dapat ditanggulangi melalui pelayanan yang diberikan oleh Orsos. Dengan demikian berarti Orsos sebagai pilar partisipan atau mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial telah menunjukkan kontribusi yang cukup berarti dalam upaya untuk mengurangi atau setidaknya dapat menghambat lajunya pertumbuhan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayahnya.

3. Program akselerasi kontribusi Organisasi Sosial

Dengan berlakunya UU No 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi Orsos memerlukan paradigma baru, dari semula sebagai “pembantu pemerintah” sekarang menjadi “mitra” setara dengan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Orsos yang bergerak dibidang pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan kemampuannya. Hal itu terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sosial dapat diberikan secara lebih baik dan menjangkau golongan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Informasi dari instansi terkait menyatakan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan Orsos memberi dukungan dana melalui dana Dekonsentrasi dan APBD yang masih sangat terbatas untuk peningkatan Orsos dari tipologi tumbuh sampai maju/mandiri. Untuk meningkatkan kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan pelatihan teknis operasional (pekerjaan sosial, keterampilan) terhadap tenaga atau SDM Orsos dan meningkatkan dana untuk kegiatan/pelayanan Orsos .

Komitmen pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah tercermin dari berbagai fasilitas yang diberikan dalam bentuk pengembangan SDM pengelola Orsos, seperti pelatihan tentang manajemen Orsos dan pekerjaan sosial, pelatihan pemantapan Orsos dalam bidang agribisnis dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Disamping itu, Orsos juga diberi bantuan stimulan untuk usaha baik dalam bentuk peralatan maupun modal usaha.. bantuan sarana dan prasarana Orsos meliputi perlengkapan administrasi dan perlengkapan pelayanan, dan juga diberi dana permakanan bagi penerima pelayanan yang berada dipanti dari subsidi BBM.

Hasil diskusi kelompok dengan para praktisi sosial dapat dikemukakan beberapa kritikan, yaitu : (1) fasilitas yang diberikan oleh pemerintah belum terskema, dalam arti pemerintah baru memberi bantuan (material, immaterial, dan pelatihan) belum sampai pada bagaimana memasarkan hasil/produk yang dihasilkan oleh penerima pelayanan; (2) program bantuan/pemberdayaan seringkali tidak tepat sasaran, yang bersifat “*top down*” tidak berdasarkan kebutuhan penerima pelayanan; (3) kurang dilakukan pendampingan; (4) kurang dilakukan monitoring dan evaluasi; (5) ada kesan tidak ada koordinasi dengan instansi terkait.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Mencermati uraian di atas mengenai kondisi, kontribusi, dan program akselerasi kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Kondisi Orsos yang menjadi sasaran penelitian ini , dapat dikemukakan : (a) segi legalitas, semua Orsos telah berbadan hukum , mempunyai akte notaries, terdaftar pada Kesbanglinmas, Dinas Sosial Kota dan Provinsi serta adanya legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (b) SDM Orsos , dilihat dari segi pendidikan para pengurus relatif cukup baik, namun jumlah tenaga Orsos kategori “tumbuh” masih sangat terbatas; (c) sarana dan prasarana yang dimiliki Orsos pada umumnya cukup memadai; (2) Kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan dukungan yang cukup baik, dalam arti pelayanan yang diberikan Orsos dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah atau menghambat meningkatnya jumlah PMKS di lingkungannya; (3) Komitmen pemerintah terhadap program akselerasi kontribusi Orsos berupa bantuan yang bersifat fisik (sarana dan

prasarana), pelatihan manajemen Orsos, dan dana permakanan; (4) Beberapa kritikan dari para praktisi sosial, yaitu : (a) fasilitas yang diberikan oleh pemerintah belum terskema, dalam arti pemerintah baru memberikan bantuan (material, immaterial, pelatihan) tapi belum sampai pada bagaimana memasarkan hasil/produk yang dihasilkan oleh penerima pelayanan; (b) program bantuan/pemberdayaan seringkali tidak tepat sasaran yang bersifat “*top-down*” tidak berdasarkan kebutuhan penerima pelayanan; (c) kurangnya pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan (d) masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas bahwa kontribusi Orsos dalam pembangunan kesejahteraan sosial cukup berarti, hal itu perlu ditingkatkan, dan untuk itu disarankan beberapa hal sebagai berikut ; (1) Bagi Orsos kategori “tumbuh”, perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas tenaga serta sarana dan prasarananya ; (2) Perlu pemanfaatan tenaga lokal sebagai pendamping dalam implementasi program pemberdayaan dengan sentuhan moral – spiritual, disamping monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan dari aparat pemerintah; (3) Program pemberdayaan harus didasarkan kebutuhan penerima pelayanan , dalam arti bersifat “*bottom up* “ dan bukan “*top down* “; dan (4) Pemberdayaan Orsos menyangkut kapasitas dan kompetensi sebagai mitra kerja pemerintah perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

BIBLIOGRAFI

- Badan Pusat Statistik Kota Palembang (2009) *Palembang Dalam Angka Tahun 2009*.
- Departemen Sosial (2003) *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Departemen Sosial ((2008) *Pedoman Klasifikasi Organisasi Sosial*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Marzali, Amri (2005) *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Pusat Data dan Informasi (2008) *Data PMKS & PSKS*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial – Departemen Sosial RI.
- Suharto, Edi (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Saifuddin, Achmad Fedyani (2006) *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulistiati (tanpa tahun) *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial: Dimuat Dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Seri IT: 01*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial – Departemen Sosial RI.
- Sztompka, Piotr (2007) *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar 1945 (2004) *Naskah Asli & Perubahannya*, Jakarta: Pustaka Pergaulan
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI.